

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan hubungan kesepakatan antara pemilik dengan agen guna menghasilkan perjanjian atau kontrak. Dengan ini pemilik ingin mengetahui informasi atau aktivitas manajemen terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan dan sebagai tanggungjawaban perusahaan terkait dengan kinerja manajer. (Ariningtika *et al.*, 2013) menyatakan hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak *principal* memberi wewenang kepada agen untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Agency cost (biaya keagenan) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya *residual loss*. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa keagenan (*agency cost*) ke dalam tiga jenis, yaitu :

a. *The monitoring by the principal*

Biaya ini merupakan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku agen.

b. *The bonding cost*

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan *principal*

c. *The residual loss*

Biaya ini merupakan pengorbanan nilai uang yang *ekuivalen* karena penurunan kemakmuran yang dialami oleh *principal* akibat perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen.

Berdasarkan teori agensi, untuk meningkatkan reputasi perusahaan dimata *principal*. Perusahaan memberikan suatu perhatian kepada *principal* sebagai wujud pertanggungjawaban, dimana manajer sebagai *agent* akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak *principal*, salah satunya dengan melakukan *corporate environmental disclosures* sebagai tindakan CSR.

2. Stakeholders Theory

Stakeholders yaitu pihak-pihak internal maupun eksternal yang saling berhubungan dan bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi. *Stakeholders* terdiri dari badan industri, *supplier*, pasar modal, negara, karyawan, masyarakat, pesaing, pemerintah asing dan lain-lain. Namun ada juga yang berpendapat bahwa *stakeholders* berpendapat bahwa ada pihak lain yang terlibat, yaitu lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, kelompok politik, masyarakat, pekerja prospektif, pelanggan prospektif dan publik secara umum.

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*. dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholders* kepada perusahaan tersebut Ghazali dan Chairi (2007). Perusahaan menganggap bahwa peran para *stakeholders* sangat berpengaruh bagi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi

dan menjadi pertimbangan untuk mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan.

Stakeholders juga sebagai tolak ukur dan juga sebagai pertimbangan dalam perusahaan karena *stakeholders* merupakan pemegang posisi yang kuat dalam perusahaan. *Stakeholders* pada dasarnya dapat mempengaruhi pemakaian berbagai sumber ekonomi yang akan digunakan dalam aktivitas perusahaan. Maka dari itu, *stakeholders theory* pada dasarnya berkaitan dengan cara-cara yang akan digunakan perusahaan dalam mengendalikan pengaruh *stakeholders*

3. Legitimacy Theory

Teori legitimasi menyebutkan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatannya sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana organisasi tersebut berada. Norma masyarakat selalu berubah seiring dengan perubahan waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. Legitimasi juga bisa dilihat sebagai suatu hal yang akan diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan suatu hal yang diinginkan atau dicari oleh perusahaan dari masyarakat.

Menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan oleh komunitas. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat proses produksi akan mempengaruhi keadaan sekitar. Sehingga perusahaan tentu harus lebih memberikan kepeduliannya lagi kepada lingkungan

karena dengan kepedulian yang tinggi maka masyarakat akan lebih menerima keberadaan perusahaan

4. Signaling Theory

Signalling theory menentukan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*.

5. Environmental Disclosures

Environmental disclosures adalah pengungkapan informasi di dalam tahunan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan Suratno, dkk, (2006). Pengungkapan informasi lingkungan atau *environmental disclosures* bertujuan sebagai media antara perusahaan, masyarakat, dan investor yang dapat digunakan

sebagai pengambil keputusan ekonomi sosial maupun politik Paramitha dan Rohman (2014). Pentingnya pengungkapan lingkungan informasi lingkungan hidup berkaitan dengan adanya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat yang timbul karena adanya interaksi perusahaan dengan lingkungan. Dengan ada halnya tersebut, menyebabkan adanya konsekuensi pada perusahaan, bahwa perusahaan harus bertanggungjawab tidak hanya terhadap kesejahteraan pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggungjawab sosial yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Effendi, dkk, (2012).

Environmental disclosures juga merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility*). Melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan, masyarakat dapat memantau aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggungjawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tetap eksis Deegan dan Brown (1998).

6. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan Ujiyantho dan Pramuka (2007). Komisaris Independen memiliki peran penting bagi perusahaan. Hal tersebut diterima secara

luas bahwa independen dewan komisaris dapat meningkatkan efektifitas dewan serta kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholdersnya* Rahmi (2014).

Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan dan menciptakan keadaan yang bersifat independen, objektif. Menurut Peraturan Pencatatan nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan efek bersifat ekuitas dibursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris Kusumaning (2004).

7. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Di Indonesia menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VII Pasal 108 dinyatakan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurus pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Rapat dewan komisaris dikaitkan sebagai dari kewajiban dewan komisaris untuk menjalankan serangkaian beserta sejumlah rapat tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007), semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu semakin sering dewan komisaris melakukan rapat, maka fungsi pengawasan dewan komisaris semakin efektif dan juga pengungkapan lingkungan pada perusahaan semakin luas.

10. Jumlah Rapat Komite Audit

Rapat komite audit merupakan kewajiban dari anggota komite audit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendiskusikan apa yang perlu perusahaan perbaiki. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit minimal mengadakan rapat 4 kali dalam satu tahun Sari (2013).

Selain tercantum dalam *corporate governance guidelines*, dalam audit *committee charter* tahun 2005 juga dinyatakan bahwa semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan semakin meningkatkan kinerja komite audit (Suhardjanto dan permatasari, 2010). Komite audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan komite audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku Sagala (2013)

11. Latar Belakang Pendidikan komisaris

Latar belakang pendidikan komisaris utama harus mempunyai pendidikan bisnis dan ekonomi (*financial*). Karena seorang presiden komisaris memiliki

kemampuan untuk mengelola bisnis dan dapat mengambil keputusan bisnis dengan baik. Komisaris utama yang mempunyai latar belakang pendidikan bisnis biasanya berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki, meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi pelaku usaha untuk mempunyai pendidikan bisnis namun akan lebih baik jika anggota dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

B. Penelitian Terdahulu Dan Penurunan Hipotesis

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan *Environmental Disclosures*

Dewan komisaris independen yaitu pihak yang memiliki kompetensi yang memadai dan tidak terafiliasi dengan anggota direksi, dewan komisaris lainnya. Terafiliasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan bisnis serta hubungan dengan pemegang saham pengendali.

Penelitian yang dilakukan Rahmi (2014) keberadaan dewan komisaris independen diharapkan bersikap netral segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholders*.

Penelitian yang dilakukan Effendi, dkk, (2012) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Namun berbeda dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen pada susunan dewan komisaris akan meningkatkan jumlah

pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan tahunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran anggota komisaris independen menjadi penting dalam menentukan level pengungkapan lingkungan hidup.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Permatasari (2010) dan Uwuigbe (2011) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

Dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen pada suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas pengawasan karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengawasan yang semakin objektif dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap manajemen akan mengatasi kemungkinan melakukan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, yang artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas terkait dengan aktivitas terhadap *environmental disclosures* yang ada pada perusahaan dan juga diharapkan dapat melindungi kepentingan perusahaan maupun *stakeholders*.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu diatas maka hipotesis pertama adalah :

H₁ : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosures*.

2. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan *Environmental Disclosures*

Rapat dewan komisaris merupakan kewajiban dari dewan komisaris untuk menjalankan segala keputusan bersama pada sejumlah rapat tentang kebijakan perusahaan yang akan dilakukan. Tujuan rapat tersebut adalah untuk mengarahkan, mengevaluasi, dan memantau aktifitas yang dikerjakan oleh perusahaan dan juga rapat dewan komisaris harus dilakukan secara berkala untuk dapat memantau segala aktifitas *environmental disclosures*. Dewan komisaris harus mempunyai skedul atau jadwal rapat tetap dan rapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Effendi *et al.*, 2012) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak terpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Namun berbeda penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Zulaikha (2012), dan Ariningtika *et al.*, (2013) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosures*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Rahadjanto (2013) menunjukkan bahwa semakin semakin sering dewan komisaris melakukan rapat maka semakin baik pelaksanaan pengungkapan lingkungan perusahaan. karena rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang intensif untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi perusahaan.

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan

perusahaan yang akan dijalankan. Hal ini berarti semakin sering frekuensi dewan komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka pengungkapan lingkungan perusahaan akan semakin luas

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu diatas maka hipotesis kedua adalah :

H₂ : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosures*.

3. Jumlah Rapat Komite Audit dan *Environmental Disclosures*

Komite audit merupakan salah satu komite penunjang dewan komisaris. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas komite audit adalah pertemuan formal dan informal. Pertemuan formal dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Selain melukan pertemuan formal, komite audit juga melakukan pertemuan informal, misalnya melakukan komunikasi dengan manajemen, akuntan publik, dan auditor internal. Komite audit biasanya membuat agenda rapat dengan menerima masukan dari manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal.

Penlitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosures*. Akan tetapi penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2009), Sagala (2013), Ariningtika, dkk, (2013) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *environmental disclosures*.

Ukuran komite audit sangat penting untuk pengawasan dan pengendalian perusahaan. sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik pengungkapan lingkungan perusahaan sehingga jika semakin besar jumlah rapat komite audit diharapkan dapat menjaga dalam hal pengawasan terhadap kinerja manajemen atau internal perusahaan dengan lebih baik. Dengan demikian, semakin banyak jumlah pertemuan komite audit diharapkan akan semakin membuat informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih *reliable*.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu diatas maka hipotesis ketiga adalah :

H₃ : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosures*

4. Latar Belakang Pendidikan Komisaris dan Environmental Disclosures

latar belakang pendidikan komisaris utama harus mempunyai latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi (*financial*). Ketika semakin baik atau tinggi latar belakang pendidikan dari presiden komisaris dalam suatu perusahaan, dimana latar belakang pendidikan tersebut harus sesuai untuk mengelola kemampuan bisnis dan ekonomi. Maka akan berdampak pada semakin besarnya pengaruh presiden komisaris atas kompetensi yang dimiliki dalam membuat keputusan strategis, pengawasan terhadap segala bentuk aktivitas perusahaan, dan memberikan masukan kepada dewan direksi terkait dengan pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan semakin optimalnya akuntabilitas publik terkait dengan

tanggungjawaban terhadap *environmental disclosures*. Penelitian yang dilakukan oleh Effendi, dkk, (2012), dan suhardjanto, (2010), menyatakan bahwa latar belakang pendidikan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe, dkk, (2011) dan Sagala (2013), yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosures*.

Dengan semakin baik atau tinggi latar belakang pendidikan presiden komisaris yang dimiliki kemampuan mengelola bisnis dan ekonomi (*financial*) maka akan semakin besar pengaruh presiden komisaris dalam pengambilan keputusan dan pengawasan serta memberikan nasehat atau masukan kepada dewan direksi tentang pengungkapan lingkungan. Hal ini bertujuan meningkatkan kinerja manajemen yang transparan dan akuntabilitas publik terkait dengan tanggungjawab terhadap *environmental disclosures*.

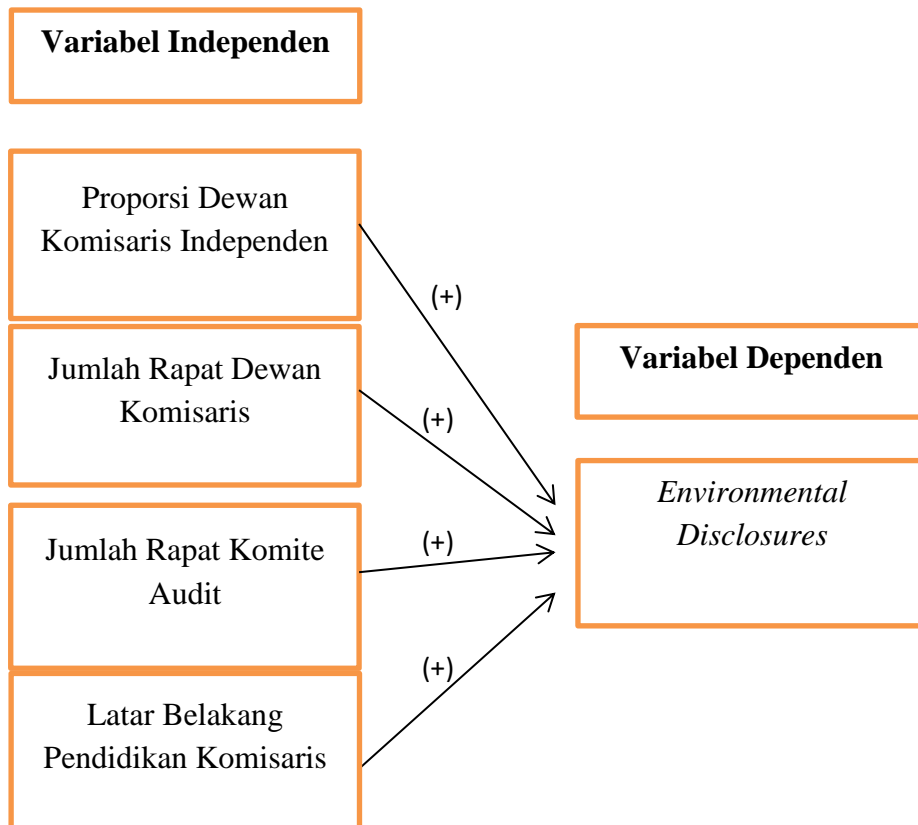
Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu diatas maka hipotesis kelima adalah :

H₄ : Latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosures*

Gambar 2.1
Model Penelitian

C. Model Penelitian

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang diambil yaitu 2011-2015

B. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Data diperoleh melalui media perantara dalam bentuk data sudah jadi dan dicatat oleh pihak lain atau berupa hasil publikasi. Data yang digunakan merupakan data keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel tidak secara acak dengan menggunakan pertimbangan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Teknik pengambilan sampel perusahaan dalam penelitian dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2011-2015.

2. Perusahaan yang memiliki data-data lengkap yang terkait dengan variabel penelitian.
3. Perusahaan sampel tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari artikel, jurnal, literature, dan hasil penelitian terdahulu. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang telah dipublikasikan dan proses pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan yang disampaikan Bursa Efek Indonesia.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah pengungkapan lingkungan perusahaan atau *environmental disclosure*. *Environmental disclosures* adalah bentuk kontribusi atau peran dari perusahaan dalam menginformasikan aktivitas-aktivitas lingkungan yang telah dilaporkan pada laporan tahunan guna transparansi dan akuntabilitas publik oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengukur pengungkapan. Pengukuran *environmental disclosures* perusahaan dalam penelitian ini menggunakan Indeks *Global Reporting Initiative's* (GRI), (Effendi *et al*, 2012) Atas dasar badan lingkungan (*environmental*), indeks GRI terdiri dari 1 dimensi dan 9 aspek dengan 30 item.

GRI merekomendasikan beberapa aspek lingkungan yang harus diungkapkan dalam annual report, ada 30 item yang direkomendasikan oleh GRI terdiri dari 9 aspek:

- a. Material
- b. Energi
- c. Air
- d. Keanekaragaman hayati
- e. *Emisi, effluent*, dan limbah
- f. Produk dan Jasa
- g. Ketaatan pada peraturan
- h. Transportasi
- i. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga lingkungan

Pengukuran *environmental disclosure* dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$N = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item pengungkapan lingkungan GRI}}$$

2. Variabel Independen

a. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen adalah perbandingan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak terafiliasi) dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Haniffa dan Cooke (2005), dimana ukuran yang digunakan oleh Haniffa dan Cooke

(2005) adalah dengan membagi jumlah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah keseluruhan anggota komisaris. Sehingga dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan akan meningkatkan dan menciptakan keadaan yang bersifat independen dan objektif. Dalam mencari jumlah dewan komisaris independen dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$PDK = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota komisaris}}$$

b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat dewan komisaris merupakan rapat yang dilakukan antara dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Indikator yang digunakan adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun. Hal ini sesuai dengan *corporate governance guidelines* (2007) dan penelitian Brick dan Chidambaran (2007).

c. Jumlah Rapat Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komite penunjang dewan komisaris. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas komite audit adalah pertemuan formal dan informal. Pertemuan formal dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit tergantung pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Jumlah pertemuan komite audit dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang dibebankan kepada komite audit. Cara mengukur jumlah rapat komite audit dalam satu tahun.

d. Latar belakang Pendidikan Komisaris

Latar belakang pendidikan komisaris utama adalah latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis yang dimiliki oleh komisaris utama. Suhardjanto (2010). Latar belakang pendidikan ini diukur dengan variabel dummy, dimana jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau bisnis diberi kode 1, selain ekonomi atau bisnis diberi kode 0 Suhardjanto dan Miranti (2009).

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Ghozali (2005) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan bahwa gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, sum, range, kurtosis, dan weakness (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis

2. Uji Asumsi Klasik

Agar dalam penelitian ini diperoleh hasil analisis data yang memenuhi syarat pengujian maka dalam penelitian dilakukan pengujian asumsi klasik untuk pengujian statistik. Tujuan dari asumsi klasik ini yaitu untuk mengetahui apakah hasil dari regresi berganda apakah terjadi

penyimpangan-penyimpangan dari asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang akan diuji :uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang dianalisis menggunakan model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi dengan distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika *Asymp Sig 2tailed* > tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), memenuhi normalitas.
2. Jika *Asymp sig 2-tailed* < tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), tidak memenuhi normalitas

b. Uji Autokorelasi

Pengujian dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara residual pada periode saat ini (t) dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, maka diukur dengan menggunakan statistik Durbin Watson (DW), yaitu (Sunyoto dalam Dewi,2014).

- Jika $DW < -2$, berarti ada autokorelasi.
- Jika $-2 \leq \text{angka DW} \leq 2$, berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika $\text{angka DW} > +2$, berarti ada autokorelasi negative.

c. Uji Multikolinearitas

Pengujian dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara residual pada periode saat ini (t) dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, maka diukur dengan menggunakan statistik Durbin Watson (DW), yaitu (Sunyoto dalam Dewi,2014).

- Jika $DW < -2$, berarti ada autokorelasi.
- Jika $-2 \leq \text{angka DW} \leq 2$, berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika angka $DW > +2$, berarti ada autokorelasi negative.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2009). Untuk mendeteksi atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Spearman. Apabila nilai *sig 2 tailed* $> 0,05$, maka model regresi tidak terkena heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis dan Analisis Data

a. Uji Hipotesis

Dalam penelitian, untuk melihat perbandingan pengaruh variabel bebas terhadap variabel menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Model regresi berganda yaitu metode statistic

berfungsi untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel yang terkait. Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, kepemilikan institusi, dan latar belakang pendidikan komisaris terhadap *environmental disclosures*.

$$EDI = \alpha_0 + \alpha_1 PDK + \alpha_2 JRDK + \alpha_3 JRKA + \alpha_4 LBPK + e$$

Keterangan Persamaan Regresi Berganda :

EDI = *Environmental Disclosures Index*

α_0 = Konstanta

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$ = Koefisien Regresi

PDK = Proporsi Dewan Komisaris

JRDK = Jumlah Rapat Dewan Komisaris

JRKA = Jumlah Rapat Komite Audit

LBPK = Latar Belakang Pendidikan Komisaris

e = Standar Error

b. Uji Nilai t

Uji statistik *t* digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis diterima jika nilai $\text{sig} < \alpha$ 0,05 (alpha) dan koefisien regresi searah dengan hipotesis.

c. Uji Nilai f

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$ (alpha), maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap dependen.

d. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted-R²*)

Uji koefisien determinasi yaitu untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R²*, dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk persentase. Kemudian sisanya (100% persentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Deskriptif Data

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Berikut ini disajikan seleksi sampel perusahaan berdasarkan kriteria pemilihan

Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Tahun					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2011-2015	23	23	23	23	23	115
2	Perusahaan pertambangan yang tidak delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-2015	22	22	22	22	22	110
3	Perusahaan yang mengungkapkan data lengkap penelitian selama tahun 2011-2015	7	7	7	7	7	35
Total sampel yang sesuai kriteria							35

Berdasarkan Tabel diatas, maka jumlah observasi dalam penelitian pada tahun 2011-2015 adalah sebanyak 35 sampel dari 7 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015, mengumumkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2011-2015.

B. Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif data digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku tersebut, terdiri dari perhitungan minimum, rata-rata, dan standard deviasi. Hasil deskriptif statistik variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Uji Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDKI	35	.17	.57	.3426	.10231
JRDK	35	2	26	8.51	7.905
JRKA	35	4	35	9.46	6.469
EN	35	.03	.37	.1454	.07609
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.2 memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian pada tahun 2011-2015.

1. Variabel *Environmental Disclosures* (EN))

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa *environmental disclosures* mempunyai nilai minimal sebesar 0,03, maksimal 0,37, rata-rata sebesar 0,1454 dengan nilai standar deviasi 0,07609.

2. Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI)

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen mempunyai nilai minimal sebesar 0,17, maksimal 0,57, rata-rata sebesar 0,3426 dengan nilai standar deviasi 0,10231.

3. Variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK)

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris mempunyai nilai minimal sebesar 2, maksimal 26, rata-rata sebesar 8,51 dengan nilai standar deviasi 7,905.

4. Variabel Jumlah Rapat Komite Audit (JRKA)

Pada Table 4.2 menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit mempunyai nilai minimal sebesar 4, maksimal 35, rata-rata sebesar 9,46 dengan nilai standar deviasi 6,469.

C. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi terhadap model penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Tujuannya adalah agar data yang digunakan layak dijadikan sumber pengujian dan dapat dijadikan kesimpulan yang benar dan tepat. Uji asumsi klasik meliputi:

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.3, uji normalitas menggunakan uji statistik *one sample Kolmogorov-smirnov*, disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.153	35	.037	.974	35	.559

a Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Sekunder Diolah

Dari hasil uji normalitas diketahui nilai statistik 0,153 atau nilai sig 0,037 atau 37% lebih besar dari nilai α 5% sehingga maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dapat dilihat dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543(a)	.295	.201	.06803	1.958

a Predictors: (Constant), LBPK, JRKA, PDKI, JRDK

b Dependent Variable: EN

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai durbin watson pada output dilihat pada gambar yaitu sebesar 1,958. Sedangkan nilai pembanding berdasarkan data keuntungan dengan melihat pada Tabel 4.4, nilai $d_{L,\alpha} = 1,2221$, sedangkan nilai $d_{u,\alpha} = 1,7259$, nilai $d_{u,\alpha} < dw < 4 - d_{u,\alpha}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa **residual tidak mengandung autokorelasi.**

3. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menggunakan nilai VIF dan *tolerance* yang disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t ²	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.013	.050		.256	.800		
	PDKI	.487	.160	.655	3.047	.005	.509	1.966
	JRDK	.000	.003	.012	.039	.969	.247	4.048
	JRKA	.002	.003	.128	.502	.619	.359	2.784
	LBPK	-.079	.044	-.507	-1.785	.084	.291	3.438

a Dependent Variable: EN

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa didalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF atau variance inflation factors (VIF) < 10 atau nilai tolerance > 0,1. Sehingga dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi terbebas dari multikolinearitas, artinya model persamaan yang dihasilkan adalah baik.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *spearman* yang disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1 (Constant)	-.014	.028		-.509	.615
PDKI	.048	.090	.117	.538	.594
JRDK	.004	.002	.790	2.523	.017
JRKA	-.001	.002	-.150	-.579	.567
LBPK	.030	.025	.348	1.205	.238

a Dependent Variable: Abs_Resid

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga disimpulkan data variabel dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, maka dapat dikatakan bahwa data variabel dalam penelitian ini dapat untuk dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan regresi linear berganda.

D. Uji Hipotesis

1. Uji Nilai t

Uji Signifikansi Parsial (Uji statistik t) digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda diperoleh hasil seperti yang tampak pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Nilai *t*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.013	.050		.256	.800		
PDKI	.487	.160	.655	3.047	.005	.509	1.966
JRDK	.000	.003	.012	.039	.969	.247	4.048
JRKA	.002	.003	.128	.502	.619	.359	2.784
LBPK	-.079	.044	-.507	-1.785	.084	.291	3.438

a Dependent Variable: EN

Sumber: Data Sekunder Diolah

a. Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Environmental Disclosures*

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan proporsi dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,487 dengan signifikan sebesar $0,005 < \alpha (0,05)$ sehingga proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Sehingga hipotesis pertama diterima.

b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosures*

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dengan signifikan sebesar $0,969 > \alpha (0,05)$ sehingga jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Sehingga hipotesis kedua ditolak.

c. Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap *Environmental Disclosures*

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dengan signifikan sebesar $0,619 > \alpha (0,05)$ sehingga jumlah rapat komite audit tidak

berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Sehingga hipotesis ketiga ditolak.

d. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosures*

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,079 dengan signifikan sebesar $0,084 > \alpha (0,05)$ sehingga latar belakang pendidikan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Sehingga hipotesis keempat ditolak.

2. Uji Nilai F

Uji nilai F yang terlihat pada Tabel 4.8 pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen, diperoleh hasil seperti yang tampak pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Nilai F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.058	4	.015	3.134	.029(a)
	Residual	.139	30	.005		
	Total	.197	34			

a Predictors: (Constant), LBPK, JRKA, PDKI, JRDK

b Dependent Variable: EN

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa hasil uji annova diperoleh nilai F hitung sebesar 3,134 dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 ($\text{sig} < 0,05$). Sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan keempat variabel independen yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan latar belakang pendidikan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosures*.

3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dimana nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1, semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin kuat pengaruh perubahan variabel-variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Diperoleh hasil seperti yang tampak pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543(a)	.295	.201	.06803	1.958

a Predictors: (Constant), LBPK, JRKA, PDKI, JRDK

b Dependent Variable: EN

Sumber: Data Sekunder Diolah

Dari hasil Tabel 4.9 tersebut diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,201 atau 20,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen *environmental disclosure* dapat dijelaskan sebesar 20,1% oleh variabel-variabel independen yaitu proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah

rapat komite audit, dan latar belakang pendidikan komisaris. Sedangkan sisanya sebesar 79,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H₁	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>environmental disclosures</i>	Diterima
H₂	Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap <i>environmental disclosures</i>	Ditolak
H₃	Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>environmental disclosures</i>	Ditolak
H₄	Latar belakang pendidikan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap <i>environmental disclosures</i>	Ditolak

E. Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan latar belakang pendidikan komisaris. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *environmental disclosures*. Variabel independen yang terbukti berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* adalah proporsi dewan komisaris independen.

1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Environmental Disclosures*.

Hasil analisis regresi mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosures* menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah (2010), Suhardjanto (2010), Permatasari (2010), dan Uwuigbe (2011) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosures*.

Dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen pada suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas pengawasan karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengawasan yang semakin objektif dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap manajemen akan mengatasi kemungkinan melakukan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer,

Semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas terkait dengan aktivitas terhadap *environmental disclosures* yang ada pada perusahaan dan juga diharapkan dapat melindungi kepentingan perusahaan maupun *stakeholders*.

2. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosures*

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Hal ini berarti semakin sering frekuensi dewan komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka pengungkapan lingkungan perusahaan akan semakin luas. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Zulaikha (2012), dan (Ariningtika *et al.*, 2013) dimana jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*.

Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosures*. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Effendi *et al.*, 2012) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Dugaan peneliti adalah jumlah rapat dewan komisaris tidak semata-mata berorientasi pada pembahasan mengenai pengungkapan lingkungan perusahaan, melainkan terkait aspek-aspek lain seperti pengungkapan kinerja perusahaan, baik dalam konteks keuangan maupun manajerial. Dimana dalam rapat dewan komisaris akan cenderung membahas tentang kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk keberlasungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Dikarenakan perusahaan pada dasarnya lebih mementingkan *profit* yang dihasilkan, guna pengembangan

usaha dan kesejahteraan para pemilik maupun anggota untuk masa yang akan datang. Maka hal tersebutlah menjadi alasan bahwa jumlah rapat dewan komisaris belum tentu memiliki hubungan terkait pembahasan mengenai *environmental disclosures*.

3. Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap *Environmental Disclosures*

Komite audit merupakan salah satu komite penunjang dewan komisaris. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas komite audit adalah pertemuan formal dan informal. Pertemuan formal dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Selain melukan pertemuan formal, komite audit juga melakukan pertemuan informal, misalnya melakukan komunikasi dengan manajemen, akuntan publik, dan auditor internal. Komite audit biasanya membuat agenda rapat dengan menerima masukan dari manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal. Dengan demikian, semakin banyak jumlah pertemuan komite audit diharapkan akan semakin membuat informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih *reliable*. Hal tersebut sejalan dengan Permatasari (2009), Sagala (2013), Ariningtika, dkk, (2013) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *environmental disclosures*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010), diduga bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan

terhadap *environmental disclosures*. Rapat komite audit membahas tentang rangkaian program pengawasan baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Namun dari hasil penelitian ini dipaparkan bahwa rapat komite audit tidak hanya memfokuskan pada program-program pengawasan terkait *environmental disclosures*, melainkan pengawasan pada aktivitas-aktivitas bisnis perusahaan seperti halnya pengawasan terhadap kinerja manajerial, kinerja keuangan, kinerja produksi, dan pengawasan-pengawasan sosial lainnya. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak eksternal perusahaan seperti pemerintah, masyarakat, investor, dan kreditor.

4. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosures*

Pada penelitian ini, variabel latar belakang pendidikan komisaris utama harus mempunyai latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi (*financial*). Ketika semakin baik atau tinggi latar belakang pendidikan dari presiden komisaris dalam suatu perusahaan, dimana latar belakang pendidikan tersebut harus sesuai untuk mengelola kemampuan bisnis dan ekonomi. Maka akan berdampak pada semakin besarnya pengaruh presiden komisaris atas kompetensi yang dimiliki dalam membuat keputusan strategis, pengawasan terhadap segala bentuk aktivitas perusahaan, dan memberikan masukan kepada dewan direksi terkait dengan pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan semakin optimalnya akuntabilitas publik terkait dengan tanggungjawaban terhadap *environmental disclosures*. Pernyataan diatas sejalan dengan pendapat Uwuigbe, dkk, (2011) dan Sagala (2013), yang

menyatakan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosures*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini diperoleh hasil latar belakang pendidikan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi dkk., (2012) dan suhardjanto (2010) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*.. Dalam hal ini komisaris utama dalam suatu perusahaan tidak hanya berlatar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi melainkan di beberapa perusahaan komisaris memiliki latar belakang pendidikan diluar bisnis dan ekonomi. Dimana dikarenakan lingkup aktivitas industri yang berbeda-beda. Sehingga memungkinkan tidak adanya pengaruh latar belakang pendidikan komisaris terhadap *environmental disclosures*.

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN

SARAN

A.Simpulan

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 2011-2015. Berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh 35 sampel pada perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebanyak 30 item.

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*
2. Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*
3. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*
4. Latar belakang pendidikan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*

B. Keterbatasan Penelitian

1. Periode penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 5 tahun penelitian yaitu tahun periode 2011-2015, peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian agar hasil lebih maksimal.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang meliputi (proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan latar belakang pendidikan komisaris) terhadap *environmental disclosures*.

C. Saran

Saran yang dapat dikemukakan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap *environmental disclosures* dalam laporan tahunan, misalnya dewan direksi, kualitas audit, jumlah komisaris wanita.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah periode tahun pengamatan dan memperbanyak jumlah sampel yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variable-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap *environmental disclosures*, seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.